E-ISSN: 3025-0994
Halaman 4731-4747
Volume 4 Nomor 4 Tahun 2026

Reaktualisasi Nilai-Nilai Kepemimpinan Rasulullah dalam Menghadapi Krisis Moral Pemimpin Modern

Heida Rahma Eksanti[1], Dhini Maulidatul Isnaini[2] , Risma Wati Agustina[3], Nilna Zulfa[4], Kharis Barik Lana[5], Muhammad Mufid[6]

[1,2,3,4,5,6] Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
e-mail: heida.rahma.eksanti24084@mhs.uingusdur.ac.id
dhini.maulidatul.isnaini24102@mhs.uingusdur.ac.id
nilna.zulfa24104@mhs.uingusdur.ac.id kharis.barik.lana24108@mhs.uingusdur.ac.id
m.mufid@uingusdur.ac.id

Abstrak

Krisis moral dalam kepemimpinan modern menjadi persoalan yang semakin kompleks, ditandai dengan munculnya berbagai penyimpangan seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, rendahnya integritas, nepotisme, serta lemahnya tanggung jawab pemimpin terhadap masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penguatan nilai-nilai moral dan spiritual dalam praktik kepemimpinan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis nilai-nilai kepemimpinan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam serta mengkaji relevansi dan aktualisasinya dalam menghadapi krisis moral pemimpin modern. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan melalui pengumpulan dan analisis literatur yang relevan berupa buku, artikel jurnal ilmiah, serta sumber-sumber keislaman. Hasil kajian menunjukkan bahwa nilai-nilai kepemimpinan Rasulullah yang tercermin dalam sifat *shiddiq* (jujur), *amanah* (dapat dipercaya), *fathanah* (cerdas dan bijaksana), serta *tabligh* (menyampaikan kebenaran) memiliki relevansi kuat dalam menjawab berbagai persoalan moral kepemimpinan kontemporer. Nilai-nilai tersebut dapat diaktualisasikan melalui penguatan integritas dan transparansi, akuntabilitas, kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan, komunikasi yang terbuka, serta penerapan prinsip keadilan dan musyawarah. Implementasinya memerlukan dukungan pendidikan karakter, keteladanan pemimpin, penguatan sistem pengawasan, dan kesadaran spiritual. Kajian ini menegaskan bahwa penerapan nilai-nilai tersebut perlu didukung oleh komitmen individu dan sistem kelembagaan yang konsisten agar tidak berhenti pada tataran konsep. Dengan demikian, reaktualisasi nilai-nilai kepemimpinan Rasulullah tidak hanya menjadi upaya menghidupkan kembali keteladanan Nabi, tetapi juga merupakan landasan dalam membangun kepemimpinan modern yang berintegritas, bertanggung jawab, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

Kata Kunci: Reaktualisasi, Kepemimpinan Rasulullah, Krisis Moral, Integritas, Kepemimpinan Modern.

Abstract

The moral crisis in modern leadership has become increasingly complex, as reflected in various forms of misconduct, including corruption, abuse of power, lack of integrity, nepotism, and inadequate accountability toward society. These conditions highlight the importance of strengthening moral and spiritual values in leadership practices. This article aimed to analyze the leadership values exemplified by Prophet Muhammad (peace be upon him) and examine their relevance and actualization in addressing the moral crisis among modern leaders. This study employed a qualitative approach using the library research method by collecting and analyzing relevant literature, including books, scholarly journal articles, and Islamic sources. The findings indicate that the leadership values embodied in the four principal characteristics of Prophet Muhammad, namely *shiddiq* (truthfulness), *amanah* (trustworthiness), *fathanah* (intelligence and wisdom), and *tabligh* (conveying the truth), are highly relevant to addressing various moral challenges in contemporary leadership. These values can be actualized through strengthening integrity and transparency, accountability, wise decision-making, open communication, and the application of justice and consultation. Their implementation requires support from character education, exemplary leadership, stronger supervisory systems, and spiritual awareness. This study emphasizes that the consistent application of these values requires both individual commitment and institutional support to ensure that they extend beyond theoretical concepts. Thus, the reactualization of the Prophet's leadership values serves not only to revive his exemplary conduct but also provides an ethical foundation for building modern leadership that is characterized by integrity, responsibility, justice, and a commitment to the common good.

Keywords: Reactualization, Prophetic Leadership, Moral Crisis, Integrity, Modern Leadership.

PENDAHULUAN

Kepemimpinan merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara karena berkaitan dengan proses mengarahkan organisasi serta menentukan kebijakan yang berdampak pada kehidupan masyarakat. Seorang pemimpin tidak hanya dituntut memiliki kemampuan dalam mengelola dan mengoordinasikan suatu organisasi, tetapi juga harus mampu menjalankan tanggung jawabnya berdasarkan nilai-nilai moral, keadilan, dan integritas. Dalam praktik kepemimpinan modern, berbagai persoalan masih kerap ditemukan, seperti korupsi, penyalahgunaan wewenang, nepotisme, kurangnya transparansi, serta kecenderungan mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok dibandingkan kepentingan publik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan seorang pemimpin tidak cukup dinilai dari pencapaian tujuan organisasi, tetapi juga perlu mempertimbangkan moralitas dan tanggung jawab dalam menggunakan kekuasaan. Dengan demikian, integritas dan nilai-nilai etika menjadi landasan penting dalam mewujudkan kepemimpinan yang bertanggung jawab serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat (Simarmata et al., 2025).

Krisis moral dalam kepemimpinan dapat berdampak luas terhadap kehidupan sosial dan tata kelola pemerintahan. Ketika seorang pemimpin tidak mampu menjaga integritas, kekuasaan berpotensi digunakan untuk memenuhi kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Penelitian Eryanto et al. (2022) mengenai lembaga sektor publik di Indonesia menunjukkan bahwa intervensi politik dalam penempatan jabatan strategis dapat menimbulkan konflik kepentingan dan mengancam kredibilitas kepemimpinan etis. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan kepemimpinan bukan hanya berkaitan dengan kemampuan teknis dan administratif, melainkan juga menyangkut komitmen terhadap nilai-nilai etika, tanggung jawab, dan kepentingan publik. Oleh karena itu, penguatan moralitas pemimpin menjadi kebutuhan penting dalam membangun tata kelola organisasi dan pemerintahan yang dapat dipercaya.

Dalam perspektif Islam, kepemimpinan memiliki kedudukan yang erat kaitannya dengan amanah dan tanggung jawab. Kepemimpinan bukan sekadar kedudukan atau kekuasaan yang harus dipertahankan, melainkan tanggung jawab yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Allah Swt. Prinsip tersebut ditegaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 58 yang memerintahkan manusia untuk menyampaikan amanah kepada pihak yang berhak menerimanya dan menetapkan hukum secara adil. Ayat ini memberikan landasan bahwa seorang pemimpin harus memiliki tanggung jawab untuk menjaga kepercayaan serta memperlakukan masyarakat secara adil. Selain itu, surah Al-Ahzab ayat 21 menjelaskan bahwa Rasulullah saw. merupakan teladan yang baik bagi orang-orang beriman. Dengan demikian, kehidupan dan kepemimpinan Rasulullah saw. dapat dijadikan pedoman dalam membangun kepemimpinan yang berlandaskan nilai moral dan spiritual.

Rasulullah saw. merupakan figur pemimpin yang memperlihatkan keselarasan antara perkataan, tindakan, tanggung jawab, dan keteladanan. Karakter kepemimpinan beliau tercermin dalam empat sifat utama, yaitu shiddiq (jujur), amanah (dapat dipercaya), fathanah (cerdas), dan tabligh (menyampaikan kebenaran). Keempat sifat tersebut bukan hanya menggambarkan kepribadian Rasulullah sebagai seorang nabi dan rasul, tetapi juga mengandung prinsip-prinsip yang dapat diterapkan dalam praktik kepemimpinan. Sifat shiddiq menjadi dasar kejujuran dan integritas, amanah mencerminkan tanggung jawab dalam menjalankan kepercayaan, fathanah menunjukkan kecerdasan dan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan, sedangkan tabligh menegaskan pentingnya keterbukaan dan komunikasi yang benar. Fatmariyanti et al. (2023) menjelaskan bahwa karakteristik kepemimpinan profetik tersebut tetap relevan untuk menghadapi tantangan kepemimpinan pada era digital, terutama dalam menyesuaikan perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai keteladanan Rasulullah saw.

Nilai-nilai kepemimpinan Rasulullah saw. memiliki relevansi dengan kebutuhan kepemimpinan modern yang tidak hanya menuntut kecakapan profesional, tetapi juga integritas karakter. Kejujuran diperlukan untuk mencegah manipulasi dan penyalahgunaan kekuasaan, amanah menjadi dasar pertanggungjawaban atas jabatan yang diberikan, kecerdasan dibutuhkan untuk menghasilkan keputusan yang tepat, sedangkan komunikasi yang baik diperlukan untuk membangun kepercayaan dan hubungan yang sehat dengan masyarakat. Kholiq (2025) mengemukakan bahwa empat sifat utama Rasulullah dapat diterjemahkan ke dalam praktik organisasi modern melalui penguatan integritas, tanggung

jawab, kompetensi, dan kemampuan komunikasi. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai kenabian tidak hanya bersifat normatif dan spiritual, tetapi juga dapat menjadi pedoman praktis dalam membangun budaya organisasi yang profesional dan beretika.

Meskipun nilai-nilai kepemimpinan Rasulullah saw. memiliki relevansi dengan kebutuhan kepemimpinan modern, penerapannya dalam menghadapi berbagai persoalan moral pemimpin saat ini masih memerlukan perhatian lebih lanjut. Perkembangan teknologi, perubahan sosial, serta meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas menghadirkan tantangan baru dalam praktik kepemimpinan. Wahab et al. (2024) menjelaskan bahwa dinamika kepemimpinan pada abad ke-21 menuntut adanya model kepemimpinan yang tetap berlandaskan nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan integritas. Oleh karena itu, keteladanan Rasulullah saw. tidak cukup hanya dipahami sebagai bagian dari sejarah dan ajaran keislaman, tetapi juga perlu diaktualisasikan sebagai pedoman dalam menghadapi persoalan kepemimpinan kontemporer. Upaya tersebut penting agar nilai-nilai kenabian dapat diwujudkan dalam bentuk sikap, perilaku, pengambilan keputusan, serta kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami, mengkaji, dan menganalisis nilai-nilai kepemimpinan Rasulullah saw. serta relevansinya dalam menghadapi krisis moral pemimpin modern. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan menelaah berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan konsep kepemimpinan dalam Islam, keteladanan Rasulullah saw., serta permasalahan moral dalam kepemimpinan kontemporer.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari Al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan prinsip-prinsip kepemimpinan Rasulullah saw., khususnya nilai shiddiq (jujur), amanah (dapat dipercaya), fathanah (cerdas), dan tabligh (menyampaikan kebenaran). Sementara itu, data sekunder diperoleh dari buku-buku ilmiah, artikel jurnal, hasil penelitian terdahulu, dan berbagai literatur lain yang relevan dengan tema kepemimpinan Islam dan krisis moral pemimpin modern.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengidentifikasi, mengumpulkan, membaca, dan mencatat informasi dari berbagai sumber literatur yang sesuai dengan fokus penelitian. Literatur yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan berdasarkan pokok pembahasan, meliputi konsep kepemimpinan Rasulullah saw., nilai-nilai utama kepemimpinan profetik, bentuk-bentuk krisis moral pemimpin modern, serta upaya reaktualisasi nilai-nilai kepemimpinan Rasulullah dalam kehidupan kontemporer.

Teknik analisis data menggunakan analisis isi (content analysis) dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, informasi yang diperoleh dari berbagai literatur dipilih dan disesuaikan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan secara deskriptif dan sistematis untuk menjelaskan hubungan antara nilai-nilai kepemimpinan Rasulullah dengan persoalan moral pemimpin modern. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan melalui analisis kritis terhadap relevansi dan

bentuk aktualisasi nilai-nilai tersebut dalam membangun kepemimpinan yang berintegritas, adil, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hakikat Kepemimpinan dalam Perspektif Islam

Kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang dalam memengaruhi, mengarahkan, dan menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Dalam perspektif Islam, kepemimpinan tidak hanya dipahami sebagai kedudukan atau kekuasaan yang memberikan kewenangan kepada seseorang untuk mengatur orang lain, tetapi juga merupakan amanah yang mengandung tanggung jawab moral dan spiritual. Seorang pemimpin tidak hanya bertanggung jawab terhadap keberhasilan organisasi atau masyarakat yang dipimpinnya, tetapi juga harus mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan tindakannya di hadapan Allah Swt. Konsep tersebut sejalan dengan prinsip kepemimpinan profetik yang menempatkan nilai spiritual, moral, dan profesionalitas sebagai satu kesatuan dalam menjalankan kepemimpinan (Falahi & Husni, 2026).

Konsep kepemimpinan dalam Islam memiliki hubungan erat dengan prinsip khalifah dan amanah. Manusia diberikan tanggung jawab untuk mengelola kehidupan di bumi dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, kekuasaan tidak seharusnya dijadikan sarana untuk memenuhi kepentingan pribadi, melainkan sebagai instrumen untuk memberikan pelayanan dan mewujudkan kebaikan bagi masyarakat. Prinsip tersebut sejalan dengan QS. An-Nisa ayat 58 yang memerintahkan manusia untuk menyampaikan amanah kepada pihak yang berhak serta menetapkan hukum secara adil (Kementerian Agama RI, 2019).

Dalam praktiknya, kepemimpinan Islam juga menempatkan moralitas sebagai unsur penting dalam menentukan kualitas seorang pemimpin. Kecerdasan, kemampuan manajerial, dan keterampilan mengambil keputusan memang diperlukan, tetapi semuanya harus dilandasi oleh integritas dan tanggung jawab. Pemimpin yang memiliki kemampuan intelektual tanpa disertai moralitas berpotensi menggunakan kekuasaannya secara tidak tepat. Sebaliknya, pemimpin yang berpegang pada nilai-nilai agama akan menjadikan jabatan sebagai bentuk pengabdian, bukan sebagai alat untuk memperoleh keuntungan pribadi. Kartika et al. (2025) menjelaskan bahwa kepemimpinan pendidikan Islam perlu mengintegrasikan nilai shiddiq, amanah, tabligh, fathanah, dan keadilan dengan prinsip kepemimpinan partisipatif agar tercipta kepemimpinan yang berintegritas dan bertanggung jawab.

Kajian terbaru menunjukkan bahwa pemahaman tentang kepemimpinan dalam Islam tidak berhenti pada soal jabatan. Wati et al. (2025) menjelaskan bahwa kepemimpinan dalam perspektif Islam merupakan amanah suci dari Allah kepada manusia sebagai khalifah untuk memakmurkan bumi dan menjaga kemaslahatan umat. Masykur dan Sunarto (2025) menambahkan bahwa Al-Qur'an mengungkapkan konsep kepemimpinan melalui tiga istilah, yaitu khalifah, imam, dan ulil amri. Istilah imam menuntut pemimpin menyerukan kebaikan sekaligus melaksanakannya, sedangkan ulil amri merujuk pada orang yang memegang urusan dan dapat diajak bermusyawarah. Ketiga istilah tersebut memperkuat gagasan bahwa pemimpin adalah penjaga amanah, teladan, dan pihak yang terbuka terhadap dialog.

Selain itu, Wati et al. (2025) menegaskan bahwa amanah kepemimpinan membawa risiko tergelincir oleh hawa nafsu, sebagaimana tergambar dalam kisah Nabi Adam dan Nabi Daud, sehingga pemimpin memerlukan introspeksi dan kesediaan memperbaiki diri. Mereka juga menyebut kejujuran, amanah, kecerdasan, dan kemampuan menyampaikan kebenaran sebagai sifat utama pemimpin, disertai keadilan, profesionalitas, dan tanggung jawab. Pandangan serupa dikemukakan oleh Masykur dan Sunarto (2025) bahwa karakteristik kepemimpinan dalam pendidikan Islam merujuk pada sifat Rasulullah, yaitu shidiq, amanah, fathonah, dan tabligh. Dengan demikian, kajian-kajian terbaru ini sejalan dengan pembahasan di atas bahwa kepemimpinan Islam menyatukan kesadaran spiritual, integritas moral, dan kecakapan dalam mengelola tanggung jawab.

Dengan demikian, hakikat kepemimpinan dalam Islam terletak pada keseimbangan antara kemampuan mengelola kekuasaan dan kesadaran moral dalam menjalankan tanggung jawab. Kepemimpinan yang ideal bukan hanya dinilai dari keberhasilan mencapai tujuan, tetapi juga dari cara tujuan tersebut dicapai, keadilan dalam mengambil keputusan, serta manfaat yang diberikan kepada orang-orang yang dipimpin (Puadi, 2025).

Nilai-Nilai Kepemimpinan Rasulullah sebagai Fondasi Kepemimpinan Ideal

Rasulullah saw. merupakan figur teladan dalam kepemimpinan Islam. Kepemimpinan beliau tidak hanya terlihat dalam keberhasilan membangun masyarakat Madinah, tetapi juga tercermin melalui kejujuran, tanggung jawab, kecerdasan, kebijaksanaan, dan kemampuan membangun hubungan sosial. Keteladanan tersebut menjadi landasan penting bagi pembentukan karakter pemimpin yang berintegritas. Sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Ahzab ayat 21, Rasulullah merupakan uswatun hasanah atau teladan yang baik bagi umat manusia (Kementerian Agama RI, 2019).

Empat sifat utama Rasulullah, yaitu shiddiq, amanah, fathanah, dan tabligh, merupakan nilai fundamental yang dapat dijadikan pedoman dalam menjalankan kepemimpinan. Keempat sifat tersebut memiliki keterkaitan dengan integritas, tanggung jawab, kompetensi, dan kemampuan komunikasi seorang pemimpin. Falahi dan Husni (2026) menjelaskan bahwa shiddiq menjadi landasan integritas dan transparansi, amanah menjadi dasar tanggung jawab dan akuntabilitas, fathanah berkaitan dengan kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan, sedangkan tabligh menjadi dasar komunikasi yang efektif.

Pertama, Shiddiq (jujur). Shiddiq menggambarkan sikap yang senantiasa menjunjung tinggi kebenaran, baik dalam perkataan maupun tindakan. Dalam kepemimpinan, kejujuran menjadi dasar terbentuknya kepercayaan antara pemimpin dan masyarakat. Pemimpin yang memiliki sifat shiddiq tidak melakukan manipulasi informasi, memberikan janji palsu, ataupun menyembunyikan fakta yang seharusnya diketahui masyarakat. Nilai ini juga menuntut adanya kesesuaian antara ucapan, kebijakan, dan tindakan. Dengan demikian, kejujuran bukan hanya menjadi karakter pribadi, tetapi juga harus diwujudkan dalam sistem kepemimpinan yang transparan (Falahi & Husni, 2026).

Kedua, Amanah (dapat dipercaya). Amanah menunjukkan kesanggupan seseorang dalam menjaga dan melaksanakan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Rasulullah memberikan teladan bahwa kepemimpinan merupakan tanggung jawab yang harus dijalankan dengan penuh kesungguhan. Dalam konteks modern, sifat amanah dapat diwujudkan melalui pengelolaan jabatan dan sumber daya secara bertanggung jawab,

menghindari korupsi, serta mengutamakan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi. Pemimpin yang amanah menyadari bahwa jabatan bukanlah hak istimewa untuk memperoleh keuntungan, melainkan kepercayaan yang harus dijaga (Kartika et al., 2025).

Ketiga, Fathanah (cerdas dan bijaksana). Fathanah mencerminkan kecerdasan dan kemampuan memahami persoalan secara mendalam. Seorang pemimpin tidak cukup hanya memiliki niat baik, tetapi juga harus mempunyai kompetensi dalam menentukan kebijakan dan menyelesaikan permasalahan. Kecerdasan seorang pemimpin harus disertai kebijaksanaan, pertimbangan moral, serta kemampuan melihat dampak jangka panjang dari keputusan yang diambil. Dalam menghadapi kompleksitas kehidupan modern, nilai fathanah diperlukan agar pemimpin mampu beradaptasi terhadap perkembangan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan (Puadi, 2025).

Keempat, Tabligh (menyampaikan). Tabligh menggambarkan kemampuan menyampaikan kebenaran secara terbuka dan bertanggung jawab. Dalam kepemimpinan, nilai ini berkaitan dengan komunikasi, keterbukaan informasi, dan kesediaan menerima aspirasi masyarakat. Pemimpin yang menerapkan sifat tabligh tidak membangun jarak dengan orang-orang yang dipimpinnya, melainkan menciptakan komunikasi yang dialogis dan transparan. Melalui komunikasi yang baik, kebijakan dapat dipahami, kritik dapat diterima, dan kepercayaan masyarakat dapat dibangun (Falahi & Husni, 2026).

Selain keempat sifat tersebut, kepemimpinan Rasulullah juga mencerminkan nilai keadilan, musyawarah, kesederhanaan, dan kasih sayang. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan tidak semata-mata berorientasi pada pencapaian kekuasaan, tetapi juga pada pembentukan hubungan yang harmonis dan kesejahteraan bersama. Kartika et al. (2025) menempatkan keadilan dan musyawarah sebagai bagian penting dari pengembangan kepemimpinan Islam yang partisipatif dan berorientasi pada integritas.

Krisis Moral dan Problematika Kepemimpinan di Era Modern

Perkembangan zaman telah membawa perubahan besar terhadap pola kepemimpinan. Kemajuan teknologi, keterbukaan informasi, globalisasi, serta kompleksitas kehidupan sosial menuntut seorang pemimpin untuk memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi. Namun, perkembangan tersebut tidak selalu diikuti dengan penguatan moralitas. Dalam sejumlah praktik kepemimpinan, masih ditemukan persoalan yang berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan, rendahnya integritas, ketidakadilan, serta lemahnya tanggung jawab terhadap masyarakat. Tantangan tersebut menunjukkan pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai etika Islam dengan praktik kepemimpinan kontemporer (Hasbi et al., 2026).

Krisis moral kepemimpinan dapat dipahami sebagai kondisi ketika seorang pemimpin mengalami kemerosotan nilai-nilai etika dalam menjalankan kewenangannya. Persoalan ini tidak hanya terlihat melalui tindakan yang melanggar hukum, tetapi juga melalui perilaku yang bertentangan dengan prinsip kejujuran, amanah, keadilan, dan tanggung jawab. Dalam kajian kepemimpinan profetik, nilai-nilai tersebut merupakan fondasi yang harus dimiliki pemimpin agar kekuasaan tidak terlepas dari tanggung jawab moral dan spiritual (Falahi & Husni, 2026).

Salah satu bentuk krisis moral yang sering menjadi perhatian adalah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Tindakan tersebut menunjukkan adanya penyimpangan terhadap amanah yang diberikan oleh masyarakat. Jabatan yang seharusnya digunakan

untuk kepentingan publik justru dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kekuasaan tanpa pengendalian moral dapat menjadi sarana untuk melakukan tindakan yang merugikan masyarakat. Oleh sebab itu, prinsip amanah dan akuntabilitas perlu menjadi bagian penting dalam tata kelola kepemimpinan (Kartika et al., 2025).

Persoalan krisis moral di era sekarang tidak terlepas dari tantangan dalam membentuk karakter generasi muda. Chonitsa, Mufid, dan Nasarruddin (2022) melalui penelitiannya mengenai peran pondok pesantren dalam membentuk moral Generasi Z di Pekalongan menunjukkan bahwa penanaman moral tidak cukup hanya dilakukan dengan memberikan pemahaman tentang ajaran agama. Lebih dari itu, diperlukan pembiasaan perilaku baik yang diterapkan secara terus-menerus dalam kehidupan sehari-hari. Pembentukan moral tersebut mencakup tiga aspek penting, yaitu menjaga hubungan dengan Allah (hablum minallah), membangun hubungan yang baik dengan sesama manusia (hablum minannas), serta menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan (hablum minal 'alam). Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan pendidikan dan kebiasaan yang dibangun di dalamnya memiliki pengaruh terhadap perkembangan karakter seseorang. Dalam kaitannya dengan kepemimpinan, seorang pemimpin juga perlu memberikan contoh nyata melalui sikap dan perilakunya, sebab keteladanan sering kali lebih mudah diterima dan ditiru daripada sekadar nasihat atau perintah (Chonitsa et al., 2022).

Persoalan berikutnya adalah krisis integritas dan ketidaksesuaian antara perkataan dengan tindakan. Seorang pemimpin terkadang menyampaikan komitmen mengenai keadilan, kesejahteraan, dan perubahan, tetapi pelaksanaannya tidak sesuai dengan apa yang telah disampaikan. Ketidaksesuaian tersebut dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin dan lembaga yang dipimpinnya. Padahal, kepercayaan merupakan salah satu unsur penting dalam membangun kepemimpinan yang efektif. Nilai shiddiq dalam kepemimpinan profetik dapat menjadi landasan untuk mengatasi persoalan tersebut melalui konsistensi antara perkataan, keputusan, dan tindakan (Falahi & Husni, 2026).

Selain itu, nepotisme dan ketidakadilan juga menjadi persoalan yang dapat merusak kualitas kepemimpinan. Praktik pengutamaan kepentingan keluarga, kerabat, maupun kelompok tertentu dalam pengambilan keputusan bertentangan dengan prinsip keadilan. Akibatnya, kesempatan dan hak masyarakat tidak diberikan berdasarkan kemampuan maupun ketentuan yang objektif, melainkan berdasarkan kedekatan pribadi. Padahal, keadilan merupakan salah satu nilai utama dalam kepemimpinan Islam yang harus diterapkan tanpa membedakan latar belakang seseorang (Kartika et al., 2025).

Krisis moral juga terlihat melalui lemahnya tanggung jawab dan keteladanan pemimpin. Pemimpin yang tidak bersedia mengakui kesalahan, menghindari tanggung jawab, dan tidak memberikan contoh perilaku yang baik dapat menciptakan budaya organisasi yang tidak sehat. Keteladanan memiliki pengaruh penting karena perilaku pemimpin sering kali menjadi acuan bagi orang-orang yang dipimpinnya. Dalam hal ini, kepemimpinan profetik menawarkan keteladanan moral melalui empat karakter utama Rasulullah sebagai pedoman perilaku pemimpin (Puadi, 2025).

Dengan demikian, krisis moral pemimpin modern tidak dapat dipandang hanya sebagai persoalan individu, tetapi juga berkaitan dengan budaya organisasi, sistem pengawasan, dan orientasi kepemimpinan. Oleh sebab itu, penyelesaiannya membutuhkan pendekatan yang menyeluruh, yaitu melalui penguatan sistem kelembagaan sekaligus pembentukan karakter dan integritas moral pemimpin (Kartika et al., 2025).

Reaktualisasi Nilai-Nilai Kepemimpinan Rasulullah dalam Menghadapi Krisis Moral Pemimpin Modern

Reaktualisasi merupakan upaya menghidupkan kembali nilai-nilai yang telah ada agar tetap relevan dan dapat diterapkan dalam menghadapi perkembangan serta persoalan kehidupan masa kini. Dalam konteks kepemimpinan, reaktualisasi nilai-nilai Rasulullah berarti menjadikan prinsip dan keteladanan kepemimpinan Nabi Muhammad saw. sebagai pedoman dalam memperbaiki kualitas moral pemimpin modern. Hal ini sejalan dengan kajian Khalidiyah et al. (2022) yang membahas reaktualisasi kepemimpinan melalui penyesuaian konsep dan nilai kepemimpinan dengan kebutuhan serta perkembangan zaman. Upaya ini tidak hanya dilakukan dengan memahami sifat-sifat Rasulullah secara teoritis, tetapi juga menerjemahkannya ke dalam perilaku, kebijakan, dan sistem kepemimpinan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat kontemporer.

Dalam penerapannya, reaktualisasi nilai-nilai kepemimpinan Rasulullah dapat diwujudkan melalui pengamalan empat sifat utama Nabi Muhammad saw., yaitu shiddiq, amanah, fathanah, dan tabligh. Falahi dan Husni (2026) menjelaskan bahwa kepemimpinan profetik yang berlandaskan keempat sifat tersebut masih relevan dalam menjawab tantangan kepemimpinan modern. Keempat karakter tersebut dapat diterjemahkan menjadi prinsip integritas, akuntabilitas, profesionalitas, dan komunikasi yang efektif. Sejalan dengan hal tersebut, Kartika et al. (2025) menekankan bahwa integrasi nilai-nilai Islam dalam kepemimpinan dapat dilakukan melalui pengembangan visi berbasis nilai, pembentukan budaya organisasi Islami, peningkatan kapasitas pemimpin, dan sistem evaluasi yang menyeluruh.

Reaktualisasi nilai-nilai tersebut dapat dilakukan melalui beberapa bentuk penerapan berikut.

1. Mengaktualisasikan Shiddiq sebagai Landasan Integritas dan Transparansi

Dalam menghadapi krisis integritas, sifat shiddiq perlu ditempatkan sebagai prinsip utama dalam membangun kepemimpinan yang jujur dan terbuka. Pemimpin harus memiliki kesesuaian antara perkataan, komitmen, dan tindakan. Kejujuran juga harus diwujudkan dalam penyampaian informasi, pelaksanaan kebijakan, serta pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil. Pada era digital, nilai shiddiq semakin penting karena informasi dapat disebarkan dengan cepat dan berpotensi dimanipulasi untuk kepentingan tertentu. Pemimpin dituntut tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, tidak membangun citra melalui kebohongan, dan tidak menggunakan media komunikasi untuk menyesatkan masyarakat. Dengan demikian, reaktualisasi shiddiq dapat diwujudkan melalui budaya keterbukaan informasi, kejujuran dalam komunikasi publik, serta konsistensi antara ucapan dan tindakan (Falahi & Husni, 2026).

2. Mengaktualisasikan Amanah sebagai Bentuk Akuntabilitas dan Tanggung Jawab

Sifat amanah menjadi jawaban terhadap persoalan korupsi, penyalahgunaan jabatan, dan lemahnya tanggung jawab pemimpin. Jabatan merupakan kepercayaan yang diberikan kepada seseorang sehingga harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Pemimpin yang memiliki sifat amanah tidak menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, melainkan mengutamakan kepentingan masyarakat. Dalam kehidupan modern, penerapan amanah dapat dilakukan melalui pengelolaan anggaran secara transparan, pelaksanaan tugas sesuai kewenangan, pengawasan terhadap penggunaan sumber daya, serta kesediaan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan. Nilai amanah juga menuntut pemimpin untuk tidak mengutamakan kepentingan keluarga atau kelompok tertentu dalam menentukan kebijakan. Kartika et al. (2025) menjelaskan bahwa amanah merupakan salah satu nilai penting dalam membangun integritas dan efektivitas kepemimpinan melalui penguatan budaya organisasi dan sistem evaluasi.

3. Mengaktualisasikan Fathanah sebagai Dasar Kebijaksanaan dalam Pengambilan Keputusan

Krisis kepemimpinan tidak hanya disebabkan oleh persoalan moral, tetapi juga dapat muncul akibat rendahnya kemampuan pemimpin dalam memahami dan menyelesaikan persoalan. Oleh karena itu, sifat fathanah perlu diaktualisasikan sebagai landasan dalam membangun kepemimpinan yang cerdas, profesional, dan bijaksana.

Pemimpin yang memiliki sifat fathanah tidak mengambil keputusan berdasarkan kepentingan pribadi, tekanan kelompok, ataupun pertimbangan emosional semata. Sebaliknya, setiap keputusan harus didasarkan pada pengetahuan, pertimbangan yang matang, serta dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat. Dalam menghadapi perkembangan teknologi dan perubahan sosial, pemimpin juga harus memiliki kemampuan beradaptasi serta keterbukaan terhadap inovasi. Reaktualisasi fathanah dapat dilakukan dengan meningkatkan kompetensi kepemimpinan, memperkuat kemampuan analisis, menggunakan data sebagai dasar pengambilan keputusan, dan mempertimbangkan nilai-nilai etika dalam setiap kebijakan. Dengan demikian, kecerdasan seorang pemimpin tidak hanya diukur berdasarkan kemampuan intelektual, tetapi juga berdasarkan kemampuannya menggunakan pengetahuan untuk menciptakan kemaslahatan bersama (Puadi, 2025; Hasbi et al., 2026).

4. Mengaktualisasikan Tabligh sebagai Prinsip Komunikasi yang Terbuka dan Bertanggung Jawab

Sifat tabligh memiliki relevansi yang kuat dalam menghadapi persoalan komunikasi pemimpin modern. Pemimpin dituntut mampu menyampaikan informasi secara benar, jelas, dan bertanggung jawab. Keterbukaan komunikasi diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui arah kebijakan, memahami keputusan yang diambil, serta memberikan kritik dan masukan terhadap kepemimpinan. Reaktualisasi tabligh dapat diwujudkan melalui komunikasi dua arah, keterbukaan terhadap aspirasi masyarakat, penyampaian informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, serta kesediaan menerima kritik. Pemimpin tidak seharusnya menggunakan komunikasi hanya untuk membangun citra atau mempertahankan kekuasaan, melainkan sebagai sarana membangun kepercayaan dan menyelesaikan

persoalan bersama. Falahi dan Husni (2026) menjelaskan bahwa tabligh menjadi dasar komunikasi efektif yang mampu memperkuat hubungan dan kerja sama dalam organisasi.

5. Mengaktualisasikan Nilai Keadilan dan Musyawarah dalam Pengambilan Kebijakan

Selain empat sifat utama tersebut, nilai keadilan dan musyawarah juga perlu diaktualisasikan dalam kepemimpinan modern. Keadilan mengharuskan pemimpin memberikan hak kepada setiap orang secara proporsional tanpa membedakan latar belakang, hubungan keluarga, maupun kepentingan kelompok. Prinsip ini penting untuk mencegah nepotisme, diskriminasi, dan penyalahgunaan kewenangan.

Sementara itu, musyawarah merupakan prinsip yang menempatkan dialog dan pertimbangan bersama sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan. Pemimpin tidak seharusnya memaksakan kehendak pribadi, melainkan membuka ruang partisipasi bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan kebijakan. Melalui musyawarah, keputusan diharapkan dapat mempertimbangkan berbagai sudut pandang dan kebutuhan masyarakat. Prinsip tersebut sejalan dengan QS. An-Nisa ayat 58 mengenai amanah dan keadilan serta QS. Asy-Syura ayat 38 mengenai musyawarah (Kementerian Agama RI, 2019). Penerapan nilai keadilan dan musyawarah juga menjadi bagian dari model kepemimpinan Islam yang partisipatif sebagaimana dijelaskan oleh Kartika et al. (2025).

Berdasarkan uraian tersebut, reaktualisasi nilai-nilai kepemimpinan Rasulullah bukan berarti menerapkan seluruh praktik kepemimpinan masa lalu secara literal, melainkan mengambil prinsip moral dan substansi keteladanan beliau untuk menjawab tantangan kehidupan modern. Shiddiq, amanah, fathanah, tabligh, keadilan, dan musyawarah dapat menjadi satu kesatuan nilai yang membentuk kepemimpinan berintegritas, profesional, transparan, serta berorientasi pada kemaslahatan bersama (Falahi & Husni, 2026; Kartika et al., 2025).

Strategi Implementasi Nilai Kepemimpinan Rasulullah dalam Membangun Integritas Pemimpin

Reaktualisasi nilai-nilai kepemimpinan Rasulullah membutuhkan strategi implementasi agar tidak berhenti sebagai wacana keagamaan. Nilai-nilai tersebut perlu ditanamkan melalui proses pendidikan, pembiasaan, keteladanan, serta penguatan sistem kelembagaan. Hal ini penting karena krisis moral kepemimpinan tidak cukup diselesaikan hanya dengan memberikan pemahaman mengenai baik dan buruk, tetapi juga memerlukan pembentukan karakter dan lingkungan yang mendukung perilaku bermoral. Kartika et al. (2025) menjelaskan bahwa penerapan nilai-nilai Islam dalam kepemimpinan dapat dilakukan melalui pengembangan visi berbasis nilai, pembentukan budaya organisasi Islami, peningkatan kapasitas kepemimpinan, dan evaluasi yang berkelanjutan.

Pertama, penguatan pendidikan karakter dan moral kepemimpinan. Pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk calon pemimpin yang memiliki integritas. Nilai kejujuran, amanah, tanggung jawab, keadilan, dan kepedulian sosial perlu ditanamkan sejak lingkungan keluarga hingga lembaga pendidikan. Dalam pendidikan Islam, keteladanan Rasulullah dapat dijadikan sumber pembelajaran untuk membangun kesadaran bahwa kepemimpinan merupakan amanah yang harus dijalankan berdasarkan nilai-nilai agama. Falahi dan Husni (2026) menegaskan bahwa empat karakter utama Rasulullah dapat

menjadi landasan pembentukan karakter kepemimpinan yang mengintegrasikan aspek spiritual, moral, dan profesional.

Kedua, membangun budaya keteladanan dalam kepemimpinan. Pemimpin harus mampu menjadi contoh melalui tindakan nyata. Keteladanan tidak cukup ditunjukkan melalui pidato, arahan, maupun aturan, tetapi harus tercermin dalam perilaku sehari-hari. Pemimpin yang menuntut kejujuran harus terlebih dahulu menunjukkan kejujuran, sedangkan pemimpin yang mengharapkan kedisiplinan harus memberikan contoh kedisiplinan. Dengan demikian, nilai-nilai kepemimpinan dapat berkembang menjadi budaya dalam organisasi. Hal ini sejalan dengan kajian Puadi (2025) yang menekankan pentingnya sikap terbuka, dapat dipercaya, adil, dan menjadi teladan dalam kepemimpinan Islam kontemporer.

Keteladanan seorang pemimpin dalam membentuk perilaku yang baik juga dapat ditemukan dalam kehidupan pesantren, terutama melalui peran seorang kiai. Mufid, Sofyan, dan Arifin (2025) dalam kajiannya yang berjudul *Trilogy of Islamic Education: Kiai Leadership in Instilling Social Ecotheology Etiquette* menjelaskan bahwa nilai-nilai adab dapat ditanamkan melalui contoh nyata yang diberikan oleh seorang kiai. Hal tersebut terlihat dari keterlibatan kiai dalam berbagai kegiatan sosial, kepedulian terhadap masyarakat yang terkena bencana, hingga upaya menjaga kelestarian lingkungan. Sejalan dengan hal tersebut, Maulana et al. (2021) menjelaskan bahwa keteladanan kiai melalui aktivitas sehari-hari dapat menjadi sarana dalam membentuk akhlak sosial santri. Gambaran ini menunjukkan bahwa kepemimpinan tidak cukup diwujudkan melalui nasihat maupun perintah, tetapi perlu dibuktikan melalui perilaku sehari-hari. Seorang pemimpin harus mampu menunjukkan secara langsung nilai-nilai kebaikan yang ingin ditanamkan kepada orang lain. Prinsip ini sejalan dengan keteladanan Rasulullah saw. sebagai *uswatun hasanah*, yang mengajarkan pentingnya keselarasan antara apa yang disampaikan dengan apa yang dilakukan.

Upaya membangun keteladanan juga dapat dilihat dalam kajian terhadap pemimpin pemerintahan. Jamil (2023) meneliti makna siddiq, amanah, tabligh, dan fathonah menurut pengalaman Bupati Gresik dengan pendekatan fenomenologi, serta hubungan siddiq dan amanah terhadap tabligh dan fathonah. Penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai profetik tidak hanya dibahas sebagai konsep, tetapi juga dapat dimaknai dalam praktik seorang pemimpin daerah. Dengan demikian, keteladanan dapat dikaji dan dinilai melalui pengalaman nyata pemimpin, sebagaimana peran kiai yang dicontohkan di lingkungan pesantren.

Ketiga, memperkuat sistem pengawasan dan akuntabilitas. Integritas individu perlu didukung oleh sistem kelembagaan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengawasan terhadap penggunaan anggaran, evaluasi kinerja, keterbukaan informasi, serta mekanisme pelaporan penyimpangan merupakan langkah yang diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini menunjukkan bahwa moralitas pemimpin dan tata kelola kelembagaan harus berjalan secara beriringan. Kartika et al. (2025) menjelaskan bahwa sistem evaluasi yang menyeluruh merupakan salah satu strategi untuk memperkuat integritas dan efektivitas kepemimpinan.

Penguatan sistem pengawasan juga perlu didukung oleh pembentukan integritas pribadi pemimpin. Chanifah et al. (2023) menyimpulkan bahwa kepemimpinan Qurani dalam

mencegah korupsi tercermin pada kepribadian Nabi Muhammad, yaitu shiddiq, amanah, fathanah, dan tabligh yang komunikatif serta transparan. Temuan ini menunjukkan bahwa pencegahan korupsi tidak hanya bergantung pada aturan dan lembaga pengawas, tetapi juga pada karakter pemimpin yang jujur, amanah, dan terbuka. Karena itu, pengawasan eksternal dan integritas internal perlu berjalan bersama.

Keempat, membangun kepemimpinan partisipatif melalui musyawarah. Pemimpin perlu memberikan ruang kepada masyarakat atau anggota organisasi untuk menyampaikan pendapat, kritik, dan saran. Sikap terbuka terhadap perbedaan pandangan dapat membantu pemimpin memahami persoalan secara lebih luas. Penerapan musyawarah juga dapat mencegah pengambilan keputusan secara sepihak yang berpotensi merugikan pihak lain. Prinsip ini sesuai dengan konsep kepemimpinan partisipatif berbasis shura yang dikembangkan dalam kajian Kartika et al. (2025).

Dalam membangun kepemimpinan partisipatif, pengalaman kepemimpinan Rasulullah di tengah masyarakat yang beragam juga dapat menjadi rujukan. Ahmad et al. (n.d.) menjelaskan bahwa keempat sifat profetik dapat diterjemahkan menjadi integritas publik, tanggung jawab yang tidak diskriminatif, komunikasi dialogis, dan kecerdasan kontekstual, dengan Piagam Madinah sebagai pengalaman pengelolaan masyarakat majemuk. Hal ini menunjukkan bahwa musyawarah dan komunikasi dialogis dapat membantu pemimpin mengambil keputusan yang adil bagi kelompok yang berbeda latar belakang.

Kelima, penguatan spiritualitas dan tanggung jawab kepada Allah Swt. Kesadaran spiritual menjadi landasan penting agar pemimpin tidak hanya takut terhadap sanksi hukum atau penilaian manusia, tetapi juga menyadari bahwa setiap amanah akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt. Kesadaran ini diharapkan dapat membentuk pengendalian diri sehingga pemimpin tetap menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan, termasuk ketika tidak berada dalam pengawasan orang lain. Falahi dan Husni (2026) menjelaskan bahwa kepemimpinan profetik mengintegrasikan dimensi spiritual, moral, dan manajerial dalam menjalankan tanggung jawab kepemimpinan.

Dengan demikian, strategi membangun integritas pemimpin harus dilakukan melalui pendekatan yang menyeluruh. Pendidikan membentuk kesadaran moral, keteladanan memberikan contoh perilaku, pengawasan menjaga tanggung jawab, musyawarah membangun partisipasi, sedangkan spiritualitas memperkuat landasan etis. Kelima aspek tersebut saling melengkapi dalam menciptakan kepemimpinan yang tidak hanya efektif secara administratif, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral dan sosial (Kartika et al., 2025; Puadi, 2025).

Relevansi Keteladanan Rasulullah bagi Pembentukan Generasi Pemimpin Masa Depan

Di tengah perubahan sosial, perkembangan teknologi, dan tantangan globalisasi, generasi pemimpin masa depan dituntut memiliki kemampuan intelektual sekaligus integritas moral. Kemampuan beradaptasi dengan perkembangan zaman memang menjadi kebutuhan penting, tetapi tidak boleh menghilangkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, keadilan, dan kepedulian terhadap sesama. Oleh karena itu, keteladanan Rasulullah perlu dijadikan landasan dalam mempersiapkan generasi pemimpin yang mampu menghadapi tantangan masa depan tanpa kehilangan identitas moral dan spiritualnya. Hasbi et al. (2026)

menjelaskan bahwa integrasi nilai-nilai Islam dalam kepemimpinan diperlukan untuk menciptakan keseimbangan antara penguasaan teknologi, pembentukan karakter, dan penguatan spiritualitas.

Relevansi kepemimpinan Rasulullah bagi generasi masa depan dapat dilihat melalui empat karakter utama. Shiddiq membentuk generasi yang jujur dan memiliki integritas dalam menjalankan tanggung jawab. Amanah membentuk kesadaran untuk menjaga kepercayaan dan tidak menyalahgunakan kewenangan. Fathanah mendorong lahirnya generasi yang cerdas, kritis, inovatif, dan mampu mengambil keputusan secara bijaksana. Sementara itu, tabligh membentuk kemampuan berkomunikasi secara terbuka, menyampaikan kebenaran, dan membangun hubungan sosial yang baik. Keempat karakter tersebut dapat dijadikan standar moral dalam membentuk generasi pemimpin yang memiliki keseimbangan antara kecerdasan dan kepribadian (Falahi & Husni, 2026).

Pembentukan karakter kepemimpinan tersebut membutuhkan keterlibatan berbagai lingkungan pendidikan. Keluarga menjadi lingkungan pertama dalam menanamkan kejujuran, tanggung jawab, dan kedisiplinan. Lembaga pendidikan berperan mengembangkan kemampuan intelektual sekaligus membentuk karakter melalui pembelajaran, organisasi, dan kegiatan sosial. Sementara itu, masyarakat menjadi ruang bagi generasi muda untuk mempraktikkan nilai kepemimpinan melalui kegiatan sosial, musyawarah, dan pengabdian. Kartika et al. (2025) menunjukkan bahwa pembentukan budaya organisasi berbasis nilai-nilai Islam dan peningkatan kapasitas kepemimpinan merupakan bagian penting dalam mengimplementasikan nilai-nilai tersebut di lingkungan pendidikan.

Pembentukan karakter generasi muda menjadi semakin penting ketika kehidupan mereka dekat dengan teknologi digital. Ayub dan Fuadi (2024) menjelaskan bahwa Generasi Z tumbuh dengan akses luas ke internet, perangkat pintar, dan media sosial, dan bahwa pendidikan karakter membantu mereka tetap memegang prinsip moral di lingkungan digital yang penuh godaan. Temuan ini mendukung argumen artikel ini bahwa sifat shiddiq dan tabligh perlu dijadikan landasan etis dalam bermedia, karena integritas harus dijaga justru di ruang yang minim pengawasan langsung. Dengan demikian, keteladanan Rasulullah tidak cukup dipelajari sebagai materi sejarah, tetapi perlu diterjemahkan ke dalam kebiasaan generasi muda sehari-hari.

Dalam konteks perkembangan teknologi digital, generasi pemimpin masa depan juga harus memiliki kemampuan menggunakan teknologi secara bijaksana dan bertanggung jawab. Informasi yang beredar secara cepat menuntut pemimpin memiliki kemampuan berpikir kritis, melakukan verifikasi informasi, serta menghindari penyebaran berita yang tidak benar. Nilai tabligh dan shiddiq dapat menjadi landasan etis dalam menggunakan media digital, sedangkan fathanah diperlukan untuk memahami perkembangan teknologi dan memanfaatkannya bagi kepentingan masyarakat. Hasbi et al. (2026) menjelaskan bahwa nilai amanah, adil, shiddiq, fathanah, dan tabligh memiliki peran mendasar dalam membentuk kepemimpinan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi di era Society 5.0.

Peran lembaga pendidikan dalam proses tersebut juga ditegaskan oleh kajian terbaru. Utomo et al. (2024) membahas peran kepemimpinan pendidikan Islam dalam

meningkatkan kedisiplinan dan kemandirian Gen-Z di sekolah, serta upaya kolaboratif dengan orang tua dan masyarakat untuk membentuk karakter islami. Hal ini sejalan dengan pembahasan sebelumnya bahwa keluarga, sekolah, dan masyarakat harus berjalan bersama. Artinya, pemimpin pendidikan sendiri perlu menampilkan sifat amanah dan keteladanan, sebab kedisiplinan dan kemandirian siswa lebih mudah tumbuh ketika dicontohkan oleh pemimpin di lingkungan mereka.

Dengan demikian, keteladanan Rasulullah memiliki relevansi penting dalam membentuk generasi pemimpin masa depan yang visioner, adaptif, dan berintegritas. Generasi pemimpin tidak cukup hanya dipersiapkan untuk memiliki kemampuan mengelola organisasi atau menguasai teknologi, tetapi juga harus memiliki kesadaran moral dalam menggunakan kemampuan dan kewenangannya. Kepemimpinan yang berlandaskan nilai-nilai Rasulullah diharapkan mampu melahirkan pemimpin yang tidak hanya mengejar keberhasilan pribadi, tetapi juga mengutamakan kepentingan masyarakat, keadilan, dan kemaslahatan bersama (Puadi, 2025; Falahi & Husni, 2026).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, nilai-nilai kepemimpinan Rasulullah, yaitu shiddiq, amanah, tabligh, dan fathanah, relevan untuk menghadapi krisis moral pemimpin modern. Keempat nilai tersebut menjadi landasan dalam membangun integritas, tanggung jawab, keterbukaan, keadilan, serta kebijaksanaan dalam kepemimpinan. Penerapannya dapat membantu mencegah penyalahgunaan wewenang, perilaku koruptif, dan keputusan yang hanya mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok. Oleh karena itu, para pemimpin disarankan meneladani sifat Rasulullah dalam tindakan, kebijakan, dan pengambilan keputusan. Pemerintah perlu memperkuat sistem pengawasan dan penegakan etika, sedangkan lembaga pendidikan perlu mengintegrasikan nilai-nilai profetik dalam pembelajaran serta pembinaan karakter agar terbentuk generasi pemimpin yang jujur, adil, amanah, bijaksana, dan mengutamakan kepentingan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, I. F., Burhanuddin, H. A. G. P., Azhar, M. F., & Nadid, E. (N.D.). Model Kepemimpinan Profetik Rasulullah Dalam Konteks Masyarakat Multikultural Di Indonesia. *Jurnal Mas Mansyur.* Https://Journal.Um-Surabaya.Ac.Id/Masmansyur/Article/Download/33156/11604/95888

Ayub, S., & Fuadi, H. (2024). Pentingnya Pendidikan Karakter Bagi Generasi Z Di Era Digital. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan,* *9*(4), 3063–3067. Https://Doi.Org/10.29303/Jipp.V9i4.2960

Chanifah, N., Samsudin, A., & Ansori, I. H. (2023). Quranic Leadership: The Effort To Realize The Integrity Of Leaders In Preventing Corruption. Https://Journal2.Uad.Ac.Id/Index.Php/Ijemi/Article/View/9173

Chonitsa, A., Mufid, M., & Nasarruddin, R. B. (2022). Peran Pondok Pesantren Dalam Membentuk Moral Generasi Z Di Pekalongan. *Jurnal Ilmiah Iqra', 16*(1), 73–89. Https://Doi.Org/10.30984/Jii.V16i1.1833

Eryanto, D., Van Eeden Jones, I., & Lasthuizen, K. (2022). The Troubling Impact Of Political Interference In Indonesian Public Sector Institutions On Ethical Leadership Credibility. *International Journal Of Public Leadership, 18*(4), 319–336.

Falahi, M. F. N., & Husni, M. (2026). Kepemimpinan Profetik Dalam Pendidikan Islam: Studi Kepustakaan Terhadap Karakter Shiddiq, Amanah, Fathanah, Tabligh. *QOUBA: Jurnal Pendidikan, 3*(1), 423–435. Https://Doi.Org/10.61104/Qb.V3i1.1098

Fatmariyanti, Y., Permana, N. S., & Supardi. (2023). Kepemimpinan Profetik Pada Era Digital. *An-Nidhom: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 8*(1).

Hasbi, M., Baitussalam, M. I., & Khamdani, A. (2026). Integrasi Nilai-Nilai Islam Dalam Kepemimpinan Pendidikan: Tantangan Dan Peluang Di Era Society 5.0. *GURU: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora, 2*(1).

Jamil, S. (2023). Makna Kepemimpinan Bupati Gresik Dalam Perspektif Kepemimpinan Islami. *MANAZHIM: Jurnal Manajemen Dan Ilmu Pendidikan, 5*(1), 335–351.

Kartika, I., Noerlitasari, Saputra, A. M., Purwaningsih, Y., Yuningsih, A., Alimuddin, & Leman, S. (2025). Integrasi Nilai-Nilai Islam Dalam Kepemimpinan Pendidikan. *At-Tadris: Journal Of Islamic Education, 4*(2), 315–324. Https://Doi.Org/10.56672/Vf6x5n20

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an Dan Terjemahannya.* Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

Khalidiyah, H., Khusnuridlo, M., & Zein, H. (2022). Reaktualisasi Kepemimpinan Perempuan Dalam Korelasinya Dengan Konsep Kepemimpinan Transformasional. *MANAGIERE: Journal Of Islamic Educational Management, 1*(2), 131–160. Https://Doi.Org/10.35719/Managiere.V1i2.1673

Kholiq, N. (2025). Praktik Rekrutmen Islami: Mengintegrasikan Shiddiq, Amanah, Tabligh, Fathanah. *JUMI: Jurnal Manajemen Islam, 2*(2).

Maulana, A. H., Suteja, S., Mahfudz, M., & Munjiat, S. M. (2021). Keteladanan Kyai Dalam Pembentukan Akhlak Sosial Santri Pondok Pesantren As-Sanusi Babakan Ciwaringin Kabupaten Cirebon. *Atthulab: Islamic Religion Teaching And Learning Journal, 6*(1), 103–119. Https://Doi.Org/10.15575/Ath.V6i1.9682

Masykur, A. D. A., & Sunarto. (2025). Kepemimpinan Dalam Konteks Pendidikan Islam. Karakter: *Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam, 2*(2), 269–280. Https://Doi.Org/10.61132/Karakter.V2i2.603

Mufid, M., Sofyan, N. H., & Arifin, J. (2026). Trilogy Of Islamic Education: Kiai Leadership In Instilling Social Ecotheology Etiquette. *Proceedings Of The 8th International Conference On Islamic Studies (ICIS 2025)*, 1160–1169.

Puadi, H. (2025). Manajemen Kepemimpinan Dalam Pendidikan Kontemporer Melalui Perspektif Islam. *Jurnal Pusaka: Media Kajian Dan Pemikiran Islam, 15*(2), 130–147. Https://Doi.Org/10.35897/Ps.V15i2.2377

Simarmata, J. K., Warji Permana, & Warsito Kawedar. (2025). Peran Iklim Integritas Dalam Menjelaskan Pengaruh Kepemimpinan Etis Terhadap Pelanggaran Integritas Di Sektor Publik. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi, 9*(1), 246–259. Https://Doi.Org/10.33395/Owner.V9i1.2514

Utomo, A. P., Buairi, H., Citriadin, Y., Thohri, M., & Syatriadin. (2024). Peran Kepemimpinan Pendidikan Islam Dalam Meningkatkan Kualitas Kedisiplinan Dan Kemandirian Gen-Z Di Sekolah. *Pendekar: Jurnal Pendidikan Berkarakter, 7*(4), 360–369.

Wahab, M. I., Romelah, & Humaidi, N. (2024). Kepemimpinan Profetik: Urgensi Mengkaji Model Kepemimpinan KH Ahmad Dahlan Di Era Abad 21. *Jurnal Paris Langkis, 5*(1), 56–73. Https://Doi.Org/10.37304/Paris.V5i1.15306

Wati, S., Filzah, C. B., Angga, T. A., & Jendri. (2025). Pemimpin Ideal Dalam Cahaya Al-Qur'an. *Akhlak: Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat, 2*(1), 287–298. Https://Doi.Org/10.61132/Akhlak.V2i1.390